

## Terdakwa Kicen Masih Perjuangkan Bansos

SEMARAPURA, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung (non aktif) I Wayan Kicen Adnyana, terdakwa dugaan korupsi bansos fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan senilai Rp 200 juta, kini sedang menjalani persidangan. Ternyata dia masih tercatat sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan kelompok masyarakat agar mendapatkan bansos dana hibah dari pemerintah.

Proposal bansos dana hibah APBD Perubahan 2017 itu masuk dalam pembahasan antara anggota DPRD Klungkung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (12/9). Proposal yang sudah masuk dalam rekapitulasi tersebut 211 kelompok penerima bansos dana hibah, sebagian besar diperjuangkan oleh DPRD.

Data proposal itu usulan masyarakat sejak tahun 2015 lalu. Sehingga beberapa di antaranya masih tercantum nama Wayan Kicen Adnyana yang turut memperjuangkan aspirasi masyarakat

saat itu. Adapun bantuan yang diperjuangkan oleh Kicen, di antaranya penerima dari pihak Pangempon Dadia Empu Aji, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan. Bansos ini dipersiapkan untuk membangun pasamuhan senilai Rp 118.934.600, dan mendapat rekomendasi Rp 60 juta.

Dadia Pasek Gaduh, Banjar Dinas Kapit, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, untuk pembangunan bataran dan tembok piyasan Rp 50.950.000 dan direkomendasi Rp 30 juta.

Pangempon Marajan Agung Arya Wangbang Pinatih, Desa Pakraman Negari (Kecamatan Banjarangkan) pembangunan palinggih-palinggih Rp 59.469.200 direkomendasi Rp 30 juta. Pura Ibu Teguh Timbul Pasek Gelgel, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan untuk pembangunan palinggih Panyangan dan Pintu Ukir Gelung Rp 58.175.000, direkomendasi Rp 30 juta. Sehingga total bansos hibah pada APBD Perubahan 2017 di bawah aspirasi

masyarakat kepada Wayan Kicen mencapai Rp 312 juta.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Nyoman Mudarta mengatakan proposal yang diajukan oleh masyarakat yang diperjuangkan oleh Wayan Kicen sudah diusulkan kepada Pemkab sebelum Kicen terkena kasus hukum. Sehingga proposal tersebut tetap diproses. "Itu tidak akan menjadi persoalan kalau sudah sesuai persyaratan, seperti RAB, yang jelas nanti akan dicek lagi ke lapangan," katanya.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menegaskan bansos hibah kepada masyarakat tidak melihat siapa yang turut memperjuangkan atau menyerap aspirasi di masyarakat. Karena sepanjang sesuai ketentuan tetap akan diproses. Karena ada perubahan peraturan memang beberapa proposal yang diajukan tersebut perlu diperbaiki. Batas waktu pengumpulan perbaikannya, Kamis (14/9). **wa**

Edisi : Rabu, 13 September 2017

Hal : 6



## Hibah Bansos Disbud Jadi Sorotan

SEMARAPURA, NusaBali

Persoalan dana hibah bansos dibawah koordinasi Dinas Kebudayaan (Disbud) Klungkung menjadi sorotan jajaran DPRD Klungkung saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat tersebut saat DPRD dan jajaran Disbud dan lainnya, membahas APBD Perubahan 2017 di Gedung DPRD Klungkung, Senin (11/9) siang.

Dalam kesempatan itu dewan mempertanyakan tentang lambannya pencarian hibah bansos tersebut. Karena sejak tahun 2015 diusulkan, sampai saai ini belum direalisasikan. Hal ini tentu bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada DPRD Klungkung menurun dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Ini jelas menjadi pertanyaan di masyarakat. Sementara Pemprov Bali dan kabupaten lain sudah cair," ujar Sang Nyoman Putrayasa,



● NUSABALI/DEWA DARMAWAN

Rapat DPRD Klungkung dengan Pemkab Klungkung di Gedung DPRD Klungkung, Senin (11/9).

anggota DPRD Klungkung.

Oleh karena itu pihaknya meminta eksekutif bersama-sama mencairkan proposal hibah bansos tersebut supaya tidak berlarut-larut. Diharapkan, bansos ini bisa cair melalui APBD Perubahan 2017.

Anggota DPRD Klungkung I Wayan Mastra juga mempertanyakan kembali hibah

bansos dari masing-masing anggota. Dari APBD Perubahan 2015 belum ada ujungnya sampai sekarang. "Mohon itu agar dapat diberikan penjelasan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung I Nyoman Mudarta mengatakan,

pada APBD Perubahan 2017, proposal yang masuk 428. Karena ada perubahan peraturan akhirnya proposal itu dikembalikan. Setelah kembali dikumpulkan sekitar 200-an proposal itu, maka kembali dievaluasi.

Beberapa dari proposal tersebut, lanjut Mudarta, ada kegagalan, di antaranya RAB misalnya Rp 150 juta ditulis Rp 160 juta, sehingga tidak sesuai atau tidak pas. "Jelas kami tidak mengikuti itu, kemudian ada permohonan piyasan, tetapi fotonya tidak sama. Kebingungan kami bekerja seperti itu," ujarnya. Kemudian satu pura banyak proposal dipecah-pecah. Kemudian ajukan empat palinggih, tetapi sesungguhnya dua palinggih.

Menanggapi hal tersebut, Sang Nyoman Putrayasa mengatakan proposal ini dari tahun 2015, kenapa baru muncul hal seperti itu. Seha-

rusnya punya waktu banyak untuk memverifikasi kemudian menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu hanya perbaikan struktur organisasinya. Mengenai RAB yang disebut tidak sesuai, kata dia, itu hanya perbaikan teknis saja dan tidak menjadi hal prinsip, sama dengan foto-foto palinggih. "Proposal itu diajukan oleh masyarakat," katanya.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra mengatakan, pihaknya memberikan waktu tiga hari terhadap proposal yang belum terkumpul atau batas terakhir Kamis (14/9). Kemudian proposal itu akan kembali diverifikasi dan disesuaikan persyaratannya. Di antaranya persyaratan administrasi, kemudian RAB yang masuk wajar mengacu pada standar harga. "Kalau itu sesuai dan ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, TAPD akan memasang," katanya. wa

Edisi : Rabu, 13 September 2017

Hal : 6



## Mulai Dibangun, Pasar Kayuambua dan Loka Crana



• NUSABALI/EKA SRI  
Bupati Bangli I Made Gianyar meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, dan Pasar Loka Crana, Bangli, Selasa (12/9).

### BANGLI, NusaBali

Pembangunan Pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, dan Pasar Loka Crana, Bangli, mulai dikerjakan. Tata ulang pembangunan dua pasar tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat Bangli yang lebih modern.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Bangli I Made Gianyar saat meletakkan batu pertama pembangunan Pasar Kayuambua dan Pasar Loka Crana, Selasa (12/9). Bupati berharap agar pembangunan Pasar Kayuambua dan Loka Crana dapat dipercepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan mutu bangunan sesuai kontrak.

"Kami ingin kedua pasar ini bisa menjadi pusat informasi bagi masyarakat dan menjadi pasar wisata yang mampu menarik daya beli lokal dan asing. Akan tetapi kebersihan dan kenyamanan harus tetap terjaga," ujarnya.

Kadis Perindag Bangli I Nengah Sudibia, mengatakan pembangunan Pasar Kayuambua merupakan perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sumber dananya dari Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2017 dengan gelontoran dana sebesar Rp 6.000.000.000.

Menurut Nengah Sudibia, pemenang tender pembangunan Pasar Kayuambua adalah PT Berawan Tangi dengan kontrak sebesar Rp 4.381.000.000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan 24 Agustus 2017 hingga 21 Desember 2017. Sedangkan untuk tender konsultan pengawas dimenangkan oleh PT Mitra Tri Sakti dengan nilai kontrak Rp 146.637.000.

Sedangkan pembangunan Pasar Loka Crana sumber dana berasal dari APBD Bangli tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp 10.107.340.000 dengan rekan pelaksana fisik sebagai pemenang tender PT Pusuk Indah Lestari dengan nilai kontrak Rp 8.635.141.000 dengan waktu pelaksanaan kegiatan 120 hari dari 24 Agustus 2017 hingga 21 Desember 2017.

Sebagai konsultan perencana PT Mitra Tri Sakti dengan nilai kontrak Rp 112.447.000 dan CV Ganesha sebagai konsultan pengawas dengan nilai kontrak Rp 46.533.000 dengan daya tampung 185 pedagang. e

Edisi : Rabu, 13 September 2017

Hal : 8